

**PENGARUH SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,
SISTEM PENGENDALIAN INTERN, STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
(Studi Empiris pada OPD di Kota Pekanbaru Tahun 2017),**

Oleh :

Yulia Ratna Sari

Pembimbing : R. Adri Satriawan dan Arumega Zarefar

*Effect of Regional Financial Management Information Systems, Internal Control System, Government Accounting Standards and Information Technology On The Financial Statements Quality
(Empirical Study on OPD in Pekanbaru Year 2017)*

ABSTRACT

The purpose of this study are to examine and explain the effect of regional financial management information systems, internal control systems, government accounting standards and information technology utilization of the financial statements quality. The population used is the staff of Finance Department in all OPD in Pekanbaru as much as 29 OPD, the sample is limited to only the OPD which makes the Regional Finance Report. Furthermore, each of the OPD is taken 4 people consisting of the Head of Finance and 1 Treasurer and two staff, so that the sample as many as 116 people. Data analysis using multiple regression. Based on the results of the study, Regional Financial Management Information System (SIPKD), Internal Control System and Utilization of Information Technology has a significant influence on the Quality of Financial Statements of Pekanbaru. Government Accounting Standards do not have a significant influence on the Quality of Financial Statements Pekanbaru City.

Keywords : SIPKD, SPI, Information Technology and Quality Report

PENDAHULUAN

Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni : Relevan, Andal, Netral, Dapat dibandingkan dan Dapat dipahami.

Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan audit atas LKPD selama

tujuh tahun, dari tahun 2009-2016. BPK memberikan opini *qualified* dalam persentase yang lebih besar atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil pemeriksaan keuangan daerah semakin memburuk setiap tahun, hal ini didukung oleh data dari BPK yang menyatakan bahwa persentase LKPD dari tahun 2009-2015 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), dan wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK semakin berkurang dan sebaliknya, opini tidak wajar (TW),

bahkan tidak memberikan pendapat (TMP) meningkat drastis dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 mulai menunjukkan adanya perkembangan yang cukup baik, tetapi hal ini masih dinilai kurang bila dibandingkan dengan jumlah LKPD yang diaudit oleh BPK (www.bpkri.go.id, 2017).

Berkaitan dengan kualitas laporan keuangan, fenomena yang ditemukan di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Kota Pekanbaru TA 2015. Raihan WDP tahun ini merupakan keempat kalinya diterima Pemko Pekanbaru sementara sebelumnya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Catatan. Hasil LHP BPK yang mendapat opini WDP tersebut karena dalam penyajian laporan keuangan ditemukan aset sebesar Rp 2 triliun yang tak jelas pencatatannya di tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya dan Dinas Pendidikan. Aset yang mejadi temuan BPK misalkan ada jalan yang sudah dibangun, namun tidak tercatat dalam sistem (www.bpkriau.go.id).

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel (www.djk.kemendagri.go.id).

Kaitan antara SIPKD dengan kualitas laporan keuangan adalah

apabila pengolahan data keuangan yang diterapkan oleh Pemerintah daerah diharapkan akan berjalan efektif dengan mempertimbangkan elemen-elemen penting dalam penerapan sistem pengelolaan keuangan daerah seperti keamanan data, kecepatan dan ketepatan waktu, ketelitian, variasi laporan/output dan relevansi. Maha dengan efektifnya penerapan SIPKD diharapkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian Indriasari (2008), Harifan (2009) dan Yosefrinaldi (2013), menemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan hubungannya positif. Penelitian Fikri (2011) menyatakan bahwa SIPKD dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga dibutuhkan dalam menjaga kualitas laporan keuangan, hal melibatkan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mana akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi. Pengawasan dalam sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penelitian Indriasari (2008) dan Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap nilai laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan ketepatanwaktuan dan keterandalan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Susanti, 2010. Nugraha dan Susanti (2010) menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan.

Variabel berikutnya adalah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu implementasi prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penerapan SAP yang tepat dan sesuai ketentuan oleh suatu instansi pemerintah, akan mendukung terciptanya prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik, dimana dengan adanya penerapan SAP yang benar maka pengelolaan keuangan daerah akan berjalan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang ada.

Penelitian Sugeng (2014) dan Sari (2013) menemukan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap pengelolaan laporan keuangan yang baik. Selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi. Sedangkan menurut Widjajanto (2007:89) secara umum

manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan membantu dalam penyiapan laporan.

Kaitan antara pemanfaatan teknologi yang diterapkan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah, menunjukkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) menyatakan bahwa terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan Hasibuan (2010) yang menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti kembali pemanfaatan informasi teknologi ini sendiri.

Alasan dilakukannya penelitian ini adalah adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian terdahulu sehingga penulis tertarik untuk

melakukan penelitian terhadap masalah yang sama. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Darmayani, dkk (2014), namun obyek yang diteliti berbeda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Gianyar pada tahun 2013. Sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau tahun 2017.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat dibuat rumusan masalah yaitu: 1) Apakah sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?, 2) Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah? 3) Apakah standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah? dan 4) Apakah pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengolahan data keuangan yang diterapkan oleh Pemerintah daerah diharapkan akan berjalan efektif apabila mempertimbangkan elemen-elemen penting dalam penerapan sistem pengelolaan keuangan daerah seperti keamanan data, kecepatan dan ketepatan waktu, ketelitian, variasi laporan/output dan relevansi. Adanya efektifitas penerapan SIPKD maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mampu mewujudkan

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam penerapan SIPKD opini BPK WTP merupakan penilaian tertinggi yang diberikan karena menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, tidak terdapat kesalahan yang material, dan sesuai standar (Atyanta, 2011). Hal ini mengindikasikan suatu kemajuan akan kinerja instansi di pemerintah daerah karena menunjukkan bahwa dalam penyajian Laporan Keuangan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Perundang-undangan yang berlaku serta disajikan secara andal dan tepat waktu.

Indriasari (2008), Harifan (2009) dan Yosefrinaldi (2013), menemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan hubungannya positif. Penelitian Fikri (2011) menyatakan bahwa SIKD dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian Delanno (2013) serta Ratna Dewi dan Mimba (2014) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan hubungannya positif..

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dengan Kualitas Laporan Keuangan

Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas atau keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan

kepercayaan *stakeholders*. Sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mana akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi.

Indriasari (2008) dan Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) serta penelitian Suristiani dan Handayani (2015) membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap nilai laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan ketepatanwaktuan dan keterandalan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Susanti, 2010. Nugraha dan Susanti (2010) menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan.

Pengaruh Penerapan SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan daerah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan khusus untuk Pemerintah Daerah ditetapkan setelah Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 6 ayat (4) PP No. 71 Tahun 2010.

Menurut Hamzah dalam Winidyaningrum dan Rahmawati

(2010) dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Standar akuntansi pemerintah akan bisa dijalankan apabila terdapat sumber daya manusia sebagai penggerak dari sistem informasi yang ada. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas melalui informasi tersebut, maka diperlukan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan pemahaman terhadap sistem teknologi informasi yang berkembang, sehingga arus informasi akan tersampaikan dan dapat diinterpretasikan dengan baik, serta diharapkan laporan keuangan tersebut tidak kehilangan kualitas informasi.

Penelitian Sugeng (2014) dan Nugraeni dan Budiantara (2015) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang baik. Begitu juga dengan penelitian Diana Sari yang menyatakan bahwa SAP merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tata kelola keuangan daerah.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai

mesin multiguna, *multi processing*. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Penelitian Donnelly *et al.*, (1994) menemukan bahwa sistem/teknologi informasi yang dimiliki pemerintah daerah di Skotlandia belum begitu baik.

Selain keterandalan hasil operasi dan kemampuan untuk mengurangi *human error*, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengolahan data diketahui memiliki keunggulan dari sisi kecepatan. Suatu entitas akuntansi yang bernama “pemerintah daerah”, sudah pasti akan memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Pemanfaatan teknologi informasi mesti akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatanwaktuan.

Penelitian Setiawati dan Sari (2014) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan begitu juga penelitian Surastiani dan Handayani (2015) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau tepatnya dilingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah pegawai Bagian Keuangan di seluruh OPD di Kota Pekanbaru sebanyak 29 OPD.

Sampel dibatasi hanya OPD yang membuat Laporan Keuangan Daerah yaitu sebanyak 29 OPD. Selanjutnya dari masing-masing OPD yang menjadi sampel penelitian diambil 4 orang yang terdiri dari Kepala Bagian Keuangan dan 1 orang Bendaharawan serta dua orang staf, sehingga diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 116 orang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, data tersebut diperoleh langsung dari Kabag Keuangan dan Bendaharawan OPD di Kota Pekanbaru dengan menggunakan kuesioner.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner.

Definisi Operasionalisasi Variabel dan Pengukuran

Variabel dependennya adalah kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, variabel independen yang digunakan dalam penelitian adalah kompetensi sumber daya manusia dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian intern, dan standar akuntansi pemerintah.

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengukuran dengan menggunakan Skala Likert.

Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan

Sukmaningrum (2012) mendefinisikan kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana informasi tersebut sesuai dan bermanfaat untuk kebutuhan para pengguna. Kualitas informasi laporan keuangan daerah diukur dengan

empat indikator menurut Silviana dan Antoni (2014), yaitu:

1. Dapat Dipahami
 - a) Menggunakan istilah yang dapat dipahami, b) Disusun sistimatis sesuai SAP, c).Digunakan dalam pengambilan keputusan
- 2.Relevan
 - a) Manfaat umpan balik, b) Manfaat prediktif, c) Tepat waktu, d) Lengkap
- 3.Keterandalan
 - a)Penyajian yang wajar, b)Dapat diverifikasi, c) Netralitas
4. Dapat diperbandingkan
 - a) Konsistensi penerapan, b)Kebijakan akuntansi, c)Perbandingan antar waktu, d) Perbandingan antar entitas

Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini sebagai berikut:

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi bidang pengelolaan keuangan daerah. (Mardiasmo, 2009).

Penerapan SIPKD ini diukur menggunakan 5 indikator menurut Bodnar dalam Dewi dan Mimba (2014) yaitu : 1) Keamanan data, 2) Kecepatan dan ketepatan waktu, 3) Ketelitian, 4) Variasi laporan atau output dan 5) Relevansi sistem.

Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Variabel sistem pengendalian intern ini dapat diukur dengan indikator berdasarkan indikator penelitian (Surastiani dan Handayani (2015) yaitu :

- 1.Adanya Standar Operating Procedure (SOP)
- 2.Pemisahan wewenang
- 3.Dokumen dan catatan yang memadai
- 4.Tindakan disiplin atas pelanggaran
- 5.Pembatasan akses

Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel ini menggunakan indikator menurut penelitian Nugraeni dan Budiantara (2015) sebagai berikut :

- 1)Kerangka konseptual SAP. 2) Konsep penyajian laporan keuangan, 3) Konsep laporan realisasi anggaran, 4) Konsep akuntansi persediaan, 5) Konsep akuntansi aset tetap dan konstruksi dalam pengerjaan, 6) Konsep akuntansi kewajiban, 7) Konsep koreksi kesalahan atas laporan keuangan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi adalah tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi (Indriasari dan Nurhantyo, 2008). Indikatornya

adalah (Surastiani dan Handayani, 2015):

1. Sistem akuntansi sesuai dengan SAP
2. Tersedia jaringan internet
3. Jaringan internet dapat dimanfaatkan dengan baik
4. Aplikasi yang digunakan sesuai kebutuhan
5. Laporan keuangan terkomputerisasi
6. Software sesuai dengan undang-undang yang berlaku
7. Terdapat antivirus yang memadai untuk menjaga keamanan

Metode Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2009).

Pengujian Kualitas Data

1. Uji Validitas Data

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2009). Kriteria pengujian validitas data adalah sebagai berikut (Ghozali, 2013:53): a. Jika r hitung dan r hitung $>$ r tabel maka butir pernyataan tersebut valid. b. Jika r hitung positif dan r hitung $<$ r tabel maka butir pernyataan tersebut tidak valid.

2. Uji Reliabilitas Data

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2009). Untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (a). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $>$ 0,06 (Sekaran, 2006).

Uji Normalitas Data

Normalitas data merupakan asumsi yang sangat mendasar dalam analisis *multivariate*. Jika variasi yang dihasilkan dari distribusi yang tidak normal, maka uji statistic t.

3. Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Dalam penelitian ini, gejala multikolonieritas dilihat dari:

- a) nilai *Tolerance* dan lawannya
- b) *Variance Inflation Factor (VIF)*.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dan residualnya (SRESID).

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam satu model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode saat ini (t) pada kesalahan periode sebelumnya (t-1). Pengujian ini menggunakan model Durbin Watson (DW-Test).

Uji Regresi Berganda

Pengujian-pengujian tersebut didasarkan pada persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y:Kualitas Laporan Keuangan Daerah

X1: Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

X2 : Sistem Pengendalian Intern

X3 :Standar Akuntansi Pemerintahan

X4:Pemanfaatan Teknologi Informasi

a : Konstanta

b1: Koefisien regresi dari X1

b2:Koefisien regresi dari X2

b3:Koefisien regresi dari X3

b4: Koefisien regresi dari X3

e : Kesalahan residual (error turn)

Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini dilakukan dengan melihat besarnya nilai koefisien determinasi R^2 yang merupakan besaran non negatif.

Pengujian Hipotesis

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Analisis dilakukan dengan melihat tabel *coefficients* pada output SPSS. Dasar pengambilan keputusannya:

- 1) Signifikan bila r value < a (0,05) sehingga menerima H1.
- 2) Tidak signifikan bila r value > a (0,05) sehingga menolak H1.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kuesioner dan Demografi

Proses pengumpulan data dilakukan pada tanggal 11 April sampai dengan 28 April 2018 yang didistribusikan langsung oleh peneliti pada masing masing instansi pemerintah di Kota Pekanbaru.

Jumlah kuisisioner yang diisi dan dikembalikan sebanyak 95 buah dengan tingkat respon 81,91%.

Jenis kelamin dari 95 responden yang di olah, diketahui sebanyak 48 orang atau 50,50% berjenis kelamin laki-laki dan 47 orang atau 45,50% berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian sebagian besar responden adalah laki-laki.

Berdasarkan umur responden dari 95 responden terdiri dari 17 orang atau 17,90% berumur 26-28 tahun, 2 orang atau 2,10% berumur 20-22 tahun dan 23 -25 tahun, 74 orang atau 77,89% berumur 29 tahun ke atas. Dengan demikian responden yang terbanyak berdasarkan umurnya adalah pegawai yang berusia > 29 tahun.

Tingkat pendidikan terakhir responden terdiri dari 4 orang atau 4,20% pendidikannya Master (S2), 19 orang atau 20% berpendidikan DIII, berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 51 orang atau 53,70% dan 21 orang atau 22,10% berpendidikan SLTA. Dengan demikian responden sebagian besar berpendidikan Sarjana (S1).

Jabatan yang terbanyak adalah staf keuangan sebanyak 54 orang atau 56,80%, bendahara sebanyak 21 orang atau 22,10% dan sebagai Kasubag sebanyak 20 orang atau 21,10%.

Untuk masa kerja, sebanyak 13 orang atau 13,70% masa kerjanya 1 – 3 dan 7 – 9 tahun, sebanyak 19 orang atau 20% dengan masa kerja 4 – 6 tahun, 50 orang atau 52,60% memiliki masa kerja > 10 tahun.

Latar belakang pendidikan, sebanyak 45 orang atau 47,4% menyatakan berlatar belakang akuntansi dan 50 orang atau 52,60% berlatar belakang non akuntansi. Maka dapat disimpulkan bahwa

dilihat dari latar belakang pendidikan maka sebagian besar pegawai memiliki latar belakang non akuntansi.

Statistik Deskriptif

Kualitas Laporan Keuangan

Kriteria posisi jawaban 95 responden terhadap variabel kualitas laporan keuangan berada pada posisi 73,68% yang dikategorikan baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa kualitas laporan keuangan pada OPD di Kota Pekanbaru telah terpenuhi dengan baik.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah di OPD Kota Pekanbaru sudah tepat karena kecepatan, keamanan, dan kemudahan yang dihasilkan dari sistem informasi dan jaringan internet dan komputer telah terpasang serta dimanfaatkan di unit kerja. Hal ini terlihat dari rata-rata jawaban responden terhadap setiap pernyataan yaitu sebanyak 69 atau 72,63% yang dikategorikan setuju.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern

Kriteria posisi jawaban 95 responden terhadap variabel sistem pengendalian intern berada pada kategori baik dimana sebanyak 71 orang atau 74,74% menyatakan Setuju.

Standar Akuntan Pemerintah

Tanggapan responden mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di kota Pekanbaru dapat dilihat responden penelitian yang memiliki tanggapan Setuju (S) yakni sebanyak

72 orang atau 75,79%, yang menyatakan Kurang Setuju (KS) sebanyak 7 orang atau 7,30%, yang menyatakan Sangat Setuju (SS) sebanyak 15 orang atau 15,79%.

Hal ini menunjukkan bahwa menurut responden, SAP di kota Pekanbaru telah diterapkan dengan tepat. Penerapan SAP berbasis akrual dalam lingkungan pemerintahan adalah untuk mengetahui seberapa besarnya biaya yang diperlukan untuk menghasilkan pelayanan untuk kepentingan publik, serta menentukan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Tanggapan responden mengenai pemanfaatan teknologi informasi di Kota Pekanbaru dapat dilihat bahwa Subbagian akuntansi/keuangan sudah memiliki komputer yang cukup memadai untuk melaksanakan tugas. Hal ini terlihat dari rata-rata jawaban responden terhadap setiap pernyataan yaitu 3,57 yang dikategorikan setuju.

Hasil Pengujian Kualitas Data

1. Hasil Pengujian Validitas Data

Pertanyaan yang diajukan dalam variabel kualitas laporan keuangan (Y), SIPKD (X_1), SPI (X_2), SAP (X_3) dan Pemanfaatan teknologi informasi (X_4) semuanya memiliki r hitung $> r$ tabel. Dengan demikian semua butir pertanyaan adalah valid.

2. Hasil Pengujian Reliabilitas Data

Pengujian reliabilitas atau keandalan instrument dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach. Koefisien alpha untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebesar $0,881 > 0,6$, SIPKD (X_1) sebesar $0,653 > 0,6$, SPI (X_2) sebesar $0,653 > 0,6$, SAP (X_3) sebesar $0,754$

> 0.6, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4) sebesar 0,868 > 0,6, sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen yang digunakan untuk pengambilan data adalah reliable/andal.

3. Hasil Pengujian Asumsi Klasik Uji Normalitas Data

Hasil uji berupa tabel Kolmogorov Smirnov dapat disimpulkan bahwa terlihat uji K-S menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk masing-masing variabel adalah di atas 0,05. Dapat diartikan bahwa tabel tersebut menunjukkan model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

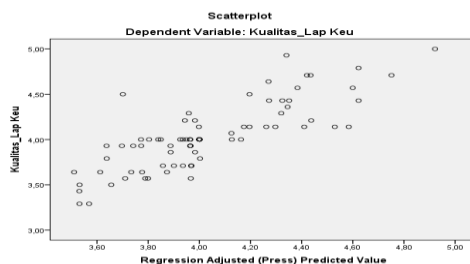
Hasil Pengujian Multikoleniaritas

Tidak terjadi multikoleniaritas pada model regresi linear berganda yang dibuat karena nilai VIF yang ada mempunyai nilai di atas angka 1 sehingga tidak melebihi batas VIF yaitu 10 dan tolerance 0,1.

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Dari gambar uji heteroskedastisitas, terlihat sebaran data dan tidak tampak adanya suatu pola tertentu pada sebaran data tersebut. Maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 1:

Gambar 1
Hasil Pengujian
Heteroskedastisitas



Sumber : Data Olahan 2018

3. Hasil Pengujian Autokorelasi

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS diperoleh nilai d hitung sebesar = 1,191, sedangkan batasan nilai DW berada, pada -2 sampai +2. Untuk itu diputuskan bahwa model ini telah terbebas dari kemungkinan adanya autokorelasi.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil perhitungan maka didapatkan persamaan regresi berganda sebagai berikut:

Persamaan Regresi Berganda:

$$Y = 0,260 + 0,441X_1 + 0,157X_2 + 0,125X_3 + 0,302 X_4 + e$$

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi yang digunakan adalah *Adjusted R Square*. Tingkat koefisien determinasi yang diperoleh adalah sebesar $Adj. R^2 = 0,691$. Ini berarti kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh variabel SIPKD, SPI dan SAP dan pemanfaatan teknologi informasi sebesar 69,10%. Sementara sekitar 40,90% dipengaruhi oleh variabel lain. Maka dapat dikatakan bahwa variabel kualitas laporan keuangan dipengaruhi SIPKD, SPI, SAP dan pemanfaatan teknologi informasi.

Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah 5,624 dan t tabel adalah 1,987 sehingga diperoleh kesimpulan t hitung > t tabel dan P value < α , maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sementara itu tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti SIPKD memiliki pengaruh

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sehingga hipotesis pertama (H_1) dapat dibuktikan.

Diterimanya hipotesis ini disebabkan SIPKD pada suatu instansi memiliki peranan penting dalam menjamin tersedianya laporan keuangan daerah yang valid. Hal ini juga berarti bahwa keberhasilan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah tergantung pada penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang digunakan. Menurut Halim (2009:18) sistem informasi pengelolaan keuangan daerah memberikan peran utama di dalam organisasi, yaitu untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, komunikasi, kolaborasi, dan kompetitif dan akuntabilitas laporan keuangan.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Darmayani, dkk (2014), Mahaputra (2014) dan Dewi dan Mimba (2014) yang menyatakan bahwa SIPKD berpengaruh dan signifikan sehingga berperan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Variabel sistem pengendalian intern adalah 2,274 dan t tabel adalah 1,987 sehingga diperoleh kesimpulan t hitung > t table dan P value < α , maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Sementara itu tingkat signifikansi sebesar 0,025 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti SPI memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga hipotesis kedua (H_2) dapat dibuktikan atau dengan kata lain H_2 diterima.

Diterimanya hipotesis ini disebabkan SPI pada suatu instansi berperan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan daerah Kota Pekanbaru. Penelitian ini mendukung hasil penelitian Setiawati dan Permata Sari (2014) serta Nurillah dan Muid

(2014) yang menyatakan bahwa SPI berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah sehingga berperan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Variabel sistem pengendalian intern adalah 1,891 dan t tabel adalah 1,987 sehingga diperoleh kesimpulan t hitung < t tabel dan P value > α , maka H_0 ditolak dan H_3 diterima. Sementara itu tingkat signifikansi sebesar 0,062 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti SAP tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga hipotesis ketiga (H_3) tidak dapat dibuktikan atau dengan kata lain H_3 ditolak.

Diterimanya hipotesis ini disebabkan SAP pada suatu instansi berperan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan daerah Kota Pekanbaru. Penelitian ini mendukung hasil penelitian Fikri, Inafy dan Martiningsih (2017) yang menyatakan bahwa SAP tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah namun tidak sejalan dengan penelitian Mahaputra dan Putra (2014), Juwita (2013) serta Nurillah dan Muid (2014) yang menyatakan bahwa SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah sehingga berperan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.

Hasil Pengujian Hipotesis Keempat

Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah 3,819 dan t tabel adalah 1,987 sehingga diperoleh kesimpulan t hitung > t table dan P value < α , maka H_0 ditolak dan H_4 diterima. Sementara itu tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti pemanfaatan teknologi informasi

memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga hipotesis ketempat (H_4) dapat dibuktikan atau dengan kata lain H_4 diterima.

Diterimanya hipotesis ini disebabkan pemanfaatan teknologi informasi pada suatu instansi berperan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan daerah Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nurillah dan Muid (2014), Setiawati dan Sari (2014) serta Indriasari (2008) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berperan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan daerah. Namun tidak mendukung penelitian Winindyaningrum (2010) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak dapat berperan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Pekanbaru. Artinya semakin baik Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Kota Pekanbaru. Dengan demikian semakin baik Sistem Pengendalian Intern maka akan semakin baik Kualitas Laporan Keuangan Kota Pekanbaru.

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel Standar Akuntansi Pemerintah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Pekanbaru.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Pekanbaru. Hal ini berarti pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan dampak yang berarti terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Pekanbaru.
5. Koefisien determinasi yang diperoleh adalah sebesar $Adj. R^2 = 0,691$. Hal ini berarti kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh variabel SIPKD, SPI, SAP dan pemanfaatan teknologi informasi sebesar 69,10%. Sementara sekitar 40,90% dipengaruhi oleh variabel lain.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan dari hasil penelitian diatas dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru agar dapat terus meningkatkan sumber daya yang kompeten dalam menjalankan tugas-tugas terutama dalam penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern karena

- berdasarkan hasil penelitian kebanyakan pegawai yang menjadi responden penelitian mengeluhkan masalah kurangnya pemahaman tentang SIPKD dan SPI.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan pengujian dengan menambahkan variabel lain seperti sarana dan prasarana, komitmen pegawai, budaya organisasi dan lain sebagainya.
 3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya membuat kuisioner yang baru dan disesuaikan dengan kondisi daerah yang diteliti sehingga dapat menggambarkan permasalahan yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmayani, Made Ayu, Nyoman Trisna Herawati, Ananta Wikrama Tungga Atmaja, 2014, Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengendalian Intern terhadap Nilai Laporan Keuangan Pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Vol 2 No 1
- Delanno, Galuh Fajar. 2013. Pengaruh Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI dan Pengawas Keuangan Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal WRA*. 1 (1).
- Dewi, P. Ayu Ratna dan Ni Putu Sri Harta Mimba, 2014, Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Kualitas Laporan Keuangan, *E-Jurnal Akuntansi*, Denpasar: Universitas Udayana. 8.3(2014):442-457
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). *SNA XI Pontianak*
- Juwita, Rukmi, 2013, Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, *Jurnal Trikonomika* Volume 12, No. 2, Desember 2013, Hal. 201–214, ISSN 1411-514X
- Mahaputra., I Putu Upabayu Rama dan I Wayan Putra, 2014, Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, *E-Jurnal Akuntansi*, Denpasar: Universitas Udayana 8.2 (2014): 230-244
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi
- Nugraeni dan M. Budiantara, 2015, *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Kinerja*, *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vo. 12 No 1 Maret 2015
- Nurillah, As Syifa dan Dul Muid, 2014, Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi

- Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok), *eprints.undip.ac.id*
- Setiawati, Erma Dan Shinta Permata Sari, 2014, Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau Dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pemahaman Akuntansi (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta), *Seminar Nasional dan Call For Paper Program Studi Akuntansi-FE UMS*, 25 Juni 2014 ISBN: 978-602-70429-2-6
- Silviana dan Erwin Antoni, 2014, *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Survey pada Pemerintah Kabupaten di Seluruh Jawa Barat*, Jurnal Provita, Vol 6 No. 1 April 2014
- Sukmaningrum, Tantriani, 2012, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang), *Skripsi*, Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, www.undip-adminlib.ac.id.
- Surastiani, Dyah Puri dan Bestari Dwi Handayani, 2015, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol 7 No. 2 September 2012
- Winidyaningrum, C., Dan Rahmawati. 2010. Pengaruh Sumberdaya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian, Intern Akuntansi. *SNA XIII Purwokerto*
- Yosefrinaldi, 2013, Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Se-Sumatera Barat), *Skripsi*, Padang: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Standar Akuntansi Pemerintahan*. 2009. PPRI No. 24. Jakarta: Sinar Grafika
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- www.bpk.go.id.